



Bonum Commune

dalam Filsafat Barat

Editor:

Simon Untara dan Datu Hendrawan

Bonum Commune dalam Filsafat Barat

1017003084

© 2017-PT Kanisius

Buku ini diterbitkan atas kerja sama

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

dan

Fakultas Filsafat

Universitas Widya Mandala Surabaya

Jl. Raya Kalisari Selatan No. 1 Tower B, 8th floor,

Pakuwon City, Laguna, Surabaya

Cetakan ke- 3 2 1

Tahun 19 18 17

Desainer sampul : Joko Sutrisno

Desainer isi : Yustinus Saras

Ilustrasi isi diolah dari http://www.freepik.com/free-vector/hands-connecting_766600.htm

ISBN 978-979-21-5345-3

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



Daftar Isi

Prakata	3
Prolog	7
Oleh Datu Hendrawan dan Simon Untara	
<i>Bonum</i> dalam Pemikiran Platon	41
Oleh Agustinus Ryadi	
Kebaikan Umum Menurut Aristoteles	63
Oleh Xaverius Chandra	
Kebaikan Umum Menurut Agustinus (354-430 M)	81
Oleh Stanislaus Dadang A	
Sang Raja, Sang Santo dan Kebaikan Bersama	89
Oleh Ramon Eguia Nadres	
<i>Bonum Commune</i> dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial	109
Oleh Anastasia Jessica Adinda S.	
Moral dan Modal: <i>Bonum Commune</i> dalam Gagasan Pemikir Pasar Bebas	143
Oleh Herlina Yoka Roida PhD	

KEBAIKAN UMUM MENURUT ARISTOTELES

Xaverius Chandra

Apa pentingnya mengangkat “Kebaikan Umum” (*Bonum Commune, Common Good*) sebagai persoalan untuk dipikirkan? Tidakkah konsep ini sudah lama ditinggalkan orang, dan hanya Gereja Katolik di abad-20 hingga sekarang yang masih memakainya dalam Ajaran Sosial Gerejanya?¹ Barangkali dalam etika sosial yang bersumber pada hukum kodrat Kebaikan Umum masih dipandang begitu penting sebagai prinsip etis bagi intervensi negara terhadap lingkup masyarakat yang lain dan pada individu-individu. Akan tetapi, berapa banyak orang yang masih mengakui hukum kodrat sebagai acuan dasar dalam penalaran etisnya?

Sehubungan dengan Kebaikan Umum Aristoteles (384-322 SM) dianggap sebagai peletak konsepsi tentangnya. Akan tetapi, apakah gagasannya untuk suatu negara-kota (*polis*) di Athena di abad ke-4 SM yang berpenduduk kurang lebih sepuluh ribu cukup memadai untuk ditarik relevansinya bagi negara modern dewasa ini? Sementara itu, Aristoteles tidak memberikan definisi tentang Kebaikan Umum maupun menunjukkan secara distingtif isinya.

Akan tetapi, bila tetap hendak dijadikan persoalan, tema Kebaikan Umum menurut Aristoteles dalam tulisan ini dielaborasi dari dua pertanyaan: Apa Kebaikan Umum menurut Aristoteles? Bagaimana mewujudkannya dalam perspektif politik Aristoteles? Sesudahnya, disampaikan beberapa poin tanggapan.

1. Apa Arti Kebaikan Umum dalam Filsafat Politik Aristoteles?

Politics dibuka dengan pernyataan tentang kebaikan umum:

“Karena kita melihat bahwa setiap negara-kota merupakan suatu jenis komunitas dan bahwa setiap komunitas diadakan untuk suatu kebaikan. Setiap manusia selalu melakukan apa saja untuk memperoleh apa yang dipandanginya baik. Jika tiap komunitas bertujuan pada suatu kebaikan, maka jelaslah bahwa setiap komunitas bertujuan pada suatu kebaikan, dan adalah komunitas yang memiliki otoritas paling besar dari semuanya dan mencakup

¹ Sejumlah pemikir liberal menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa menunjukkan pada kita dalam hal apa pada akhirnya terletak kebaikan bagi kita. Pemikir lain menyebut tidak ada “*summum bonum*” yang memadai secara arbiter dan tanpa menindas untuk dijadikan Kebaikan Umum. Ada juga yang mengajukan bahwa sains tidak bisa menunjukkan adanya fungsi unik dari manusia yang dapat memberikan gambaran mengenai kepenuhan atau kebahagiaan manusia. (Lih. THOMAS W. SMITH, “Aristotle on the Conditions for and Limits of the Common Good” dalam *American Political Science Review* vol. 93 no. 3 Sept., 1999, 625. dalam https://www.jstor.org/stable/2585578?seq=1#page_scan_tab_contents, 16 Sept 2016, 11. 29)

semua yang tertinggi dari tujuan-tujuan yang lain, yaitu kebaikan dengan otoritas terbesar. Ini adalah apa yang disebut kota ("*polis*") atau komunitas politis." (*Pol.*, I.1.1252a1–7)

Tampak di sini bahwa bukan hanya individu, melainkan juga kumpulan individu yang saling berelasi dalam suatu komunitas pun memiliki kebaikan atau tujuannya sendiri. Sebagaimana individu suatu komunitas juga teleologis. Negara-kota memiliki kebaikannya sendiri. Kebaikan Umum merupakan tujuan negara-kota. Dengan kata lain, ia merupakan *eudaimonia* negara-kota.² Sebagai kebaikan tertinggi negara-kota, Kebaikan Umum merupakan kepenuhan suatu negara kota. Kebaikan Umum negara-kota, yang disebut sebagai "kebaikan dengan otoritas terbesar", merupakan kebaikan tertinggi dari semua kebaikan yang dimiliki komunitas manusia. "Kebaikan dengan otoritas terbesar" inilah yang membuat negara-kota sebagai "komunitas yang memiliki otoritas paling besar dari semuanya dan mencakup semua."

Sampai di sini seperti dijumpai dua macam kebaikan sehubungan dengan negara kota atau *polis*: kebaikannya (milik sendiri) *polis* itu dan kebaikan (milik) setiap warga *polis* yang dijadikan kebaikan *polis* itu. Apakah Kebaikan Umum itu kebaikan dari negara-kota itu sendiri atau kebaikan dari para warga *polis* secara bersama-sama? Apakah benar bila dipandang bahwa ide Kebaikan Umum menunjuk pada kebahagiaan semua warga negara, yang mana ini merupakan suatu kumpulan atau penjumlahan (*a sum* atau *mass*)? Pada pandangan yang disebut terakhir ini terkandung anggapan akan Kebaikan Umum yang bukan sebagai suatu keseluruhan organis. Apabila anggapan ini diterima tidakkah di sini tampak bahwa Kebaikan Umum tidak memiliki arti sebagai sesuatu yang mengada sendiri yang justru padanya individu-individu berbagi? Akan tetapi, bila kebaikan itu menunjuk pada sesuatu yang diinginkan atau dituju, dan negara juga ada untuk tujuan atau kebaikannya sendiri, tidakkah sebenarnya ada kebaikan dari negara itu sendiri sebagai suatu realitas yang berdiri sendiri dan merupakan miliknya sekaligus, yang bukan kumpulan kebaikan anggota-anggotanya, tetapi justru terhadapnya anggota-anggota negara ambil bagian? Tentang kebaikan komunitas yang mengada sendiri yang padanya anggota-anggota komunitas ambil bagian ini adalah anak, yang oleh Aristoteles dipandang sebagai Kebaikan Umum bagi orang tuanya dalam komunitas familial (NE VIII 12, 1162a29). Selanjutnya, apabila Kebaikan Umum itu jumlah dari kebaikan-kebaikan individual apakah jumlah kebaikan-kebaikan itu bermanfaat bagiku sebagai satu individu partikular?³ Tidakkah pada pengertian Kebaikan Umum yang dilihat sebagai kumpulan kebaikan individual dari setiap warga negara-kota ini ada ide individualistis tentang Kebaikan Umum yang membuat Kebaikan Umum itu bukan kebaikannya komunitas, melainkan kebaikan individu-individu?⁴ Di samping itu, pembukaan dari *Politics* menunjukkan keberadaan dari adanya kebaikan sendiri dari negara-kota dengan menunjukkan bahwa setiap komunitas memiliki

² DONALD MORRISON, "The Common Good" dalam MARGUERITE DESLAURIERS dan PIERRE DESTREE, *The Cambridge Companion to Aristotle's Politics*, Cambridge University Press, NY, 2013, 167.

³ MORRISON, *Op. cit.*, 183

⁴ *Loc. cit.*, 188

kebaikannya sendiri. Lagipula, di tempat yang sama ditemukan bahwa orang-orang ber-partner dalam negara-kota demi mewujudkan suatu kebaikan yang merupakan kebaikan tertinggi dan paling otoritatif bagi semua. Tidakkah ini menunjukkan bahwa komunitas seperti negara-kota memiliki kebenarannya sendiri, yang bukan kebaikan anggota-anggotanya yang dijadikannya kebenarannya? Lagipula, dalam Buku VIII *Politics* ketika menyinggung pendidikan Aristoteles menunjukkan hanya ada satu tujuan bagi *polis* sebagai *polis* itu sendiri yang merupakan milik *polis* itu: "Karena hanya ada satu tujuan tunggal bagi polis sebagai suatu keseluruhan, adalah jelas bahwa pendidikan adalah harus satu dan sama bagi semua,....." (1337a21). Keberadaan suatu kebaikan yang dimiliki oleh suatu komunitas seperti *polis* tidak sukar dimengerti bila diingat juga etika Aristoteles yang teleologis yang meletakkan manusia, baik individual maupun komunitas, ketika bertindak cenderung bertindak demi suatu tujuan atau kebaikan. Dalam teleologi natural Aristoteles tidak sulit mengakui bahwa keberadaan suatu pengada seperti negara-kota pun untuk suatu tujuan, yang mana ini disebut Kebaikan Umum. Jadi, di hadapan pertanyaan mengenai apakah kebenarannya sendiri di sini menunjuk pada kebaikan dari komunitas itu sendiri, maka jawabannya adalah ya. Kebaikan Umum bukan kumpulan kebaikan dari individu-individu yang menyusunnya. Negara pun suatu komunitas sehingga ia memiliki kebenarannya sendiri, yang bukan kebaikan-kebaikan para individu warganya yang dikumpulkan menjadi satu.

Apakah isi Kebaikan Umum itu? Dalam hal apa tepatnya terletak Kebaikan Umum itu? Aristoteles tidak memberikan jawaban yang eksplisit tentang itu.⁵ Bila suatu negara-kota muncul oleh karena dorongan natural para warganya untuk mewujudkan kebenarannya, yang terletak dalam hidup yang baik yang terwujud melalui tindakan-tindakan berkeutamaan, maka sebenarnya kebaikan (milik khas) negara-kota itu tidak terpisah dari kebaikan pribadi individual. Negara-kota ada karena pada setiap orang terdapat dari kodratnya dorongan untuk mengaktualisasikan potensi naturalnya akan kepenuhan hidupnya melalui jalinan asosiasi atau ke-partner-an. Negara-kota dianggap sebagai asosiasi yang lebih otoritatif dan lebih komplis daripada asosiasi yang lain dalam mengusahakan realisasi potensi naturalnya itu. Negara-kota dipandang lebih berdaya untuk merealisasikan kebaikan umum secara komprehensif daripada jenis-jenis asosiasi yang lain karena asosiasi dalam negara-kota terjalin di antara manusia-manusia yang bebas, setara, dan plural dengan suatu tingkat yang tinggi dari spesialisasi ekonomis. (*Pol.*, II.2.1261a22-34) Karena itu, hanya negara-kota yang mampu memenuhi dorongan manusia oleh karena potensinya akan kepenuhannya itu.

Istilah Yunani yang dipakai Aristoteles untuk Kebaikan Umum adalah "*to koinon agathon*" dan "*to koinon sumpheron*." *Koinon* berarti umum, *agathon* berarti kebaikan. *Sumpheron* berarti kebaikan, tetapi secara lebih spesifik kebaikan di sini menunjuk pada kebaikan untuk sesuatu dan ada muatan arti keuntungan timbal balik. Negara merupakan komunitas politis. Kata komunitas memiliki asal yang sama dengan "*koinon*." *Polis* atau negara kota merupakan komunitas yang paling mendukung terwujudnya hidup yang baik bagi manusia, yang mana hidup yang baik ini merupakan syarat untuk mencapai kepenuhan manusia. Demi mencapai kepenuhannya itu maka individu-individu membentuk komunitas,

⁵ *Loc. cit.*, 182

termasuk yang politis, untuk membantunya mencapai kepenuhannya itu.⁶ Menurut Aristoteles kepenuhan ini terletak pada terwujudnya hidup yang baik. Negara-kota ada untuk kepentingan hidup yang baik para warganya (*Pol.*, 2.1252b29–30). Identifikasi tujuan negara-kota dengan kepenuhan warga negara-kota dalam hidup yang baik tampak juga pada *Politics* III.6.1278b17–24, 9.1280b39; VII.2.1325a7–10. Hidup yang baik bagi segenap warga negara-kota itulah yang disebut Kebaikan Umum.⁷ Karena hidup yang baik ini tercapai melalui hidup berkeutamaan dalam negara-kota, maka Kebaikan Umum negara-kota adalah mengusahakan kepenuhan segenap warganya melalui hidup yang baik melalui hidup berkeutamaan dalam negara-kota.

Sementara itu, “kebaikan” pada Kebaikan Umum menurut arti “*sumpheron*” pada istilah “*koinei sumpheron*” menunjuk pada manfaat. Karena itu, kebaikan pada Kebaikan Umum menunjuk pada manfaat-manfaat yang bisa diberikan komunitas bagi segenap anggotanya. Manfaat-manfaat ini menunjuk pada keuntungan-keuntungan yang diperlukan anggota-anggota komunitas bagi perwujudan kebaikan-kebaikan individualnya. Komunitas politis memiliki sumber daya paling memadai untuk memberikan manfaat-manfaat bagi individu-individu untuk mencapai kebaikan personalnya. Karena kebaikan tertinggi individu adalah kepenuhannya sebagai manusia dalam hidup yang baik, maka manfaat-manfaat yang diberikan oleh komunitas politis itu kiranya adalah yang berkontribusi bagi perwujudan hidup yang baik.⁸

Apakah Kebaikan Umum pada Aristoteles menunjuk pada apa yang bisa diusahakan negara-kota untuk menyediakan syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap-tiap warga negara untuk mencapai kebaikan individualnya sendiri? Pada pertanyaan ini terkandung ide tentang Kebaikan Umum sebagai yang instrumental dan tidak berdiri sendiri sebagai tujuan dari negara-kota. Pada Aristoteles Kebaikan Umum *polis* itu merupakan tujuan dari negara-kota. Sebagaimana negara-kota bukan instrumen demi pengada yang lain, tapi berdiri sendiri sebagai suatu pengada dengan tujuannya sendiri, demikian pula tujuan dari negara-kota, yaitu Kebaikan Umum, tidak sekadar instrumental bagi tujuan yang lain. Kebaikan Umum negara-kota ini tidak merupakan syarat bagi perwujudan kebaikan tiap individu atau kepenuhannya. Lagipula, sebagaimana suatu syarat itu instrumental dan bukan merupakan bagian dari sesuatu yang dikondisikannya, demikian pula syarat bagi Kebaikan Umum bukan Kebaikan Umum itu sendiri maupun bagian dari dirinya sendiri. Aristoteles membedakan antara syarat-syarat yang semata-mata instrumental bagi pencapaian tujuan dan tujuan itu sendiri beserta bagian-bagian intrinsiknya (EE I, 2; *Pol.*, III, 5; VII 9). Apa yang merupakan

⁶ Di sini “*eudaimonia*” diterjemahkan “kepenuhan”, bukan “kebahagiaan” untuk menghindari kesan hubungannya dengan perasaan senang. Dalam NE X, 7, 1177a11 Aristoteles menunjukkan bahwa *eudaimonia* terletak dalam pencapaian potensi seseorang secara penuh.

⁷ *Loc. cit.*, 167

⁸ Dalam NE tampak juga: “Sekarang semua bentuk komunitas adalah seperti komunitas politis; karena manusia-manusia berjalan bersama dengan pandangan akan suatu manfaat partikular, dan untuk memberikan sesuatu yang mereka perlukan untuk tujuan-tujuan hidup; dan adalah untuk kepentingan manfaat bahwa komunitas politis juga tampak mengada bersama pada mulanya dan untuk menanggung, karena ini adalah apa yang dituju oleh para legislator, dan mereka menyebut dengan tepat apa yang adalah manfaat bersama.” (VIII 9, 1160a9-14)

syarat bagi hidup yang baik bukanlah hidup yang baik itu sendiri maupun bagian daripadanya. Ia merupakan sarana mencapai hidup yang baik. Dalam perspektif ini jalan dan listrik, misalnya, merupakan instrumen atau syarat bagi hidup yang baik namun bukan merupakan bagian dari hidup yg baik. Akan tetapi, Kebaikan Umum bukan instrumen bagi kebaikan lain yang lebih tinggi atau terakhir. Ia sendiri kebaikan tertinggi, terakhir, dan paling otoritatif di suatu negara-kota. Tindakan-tindakan dan kebaikan-kebaikan yang lain di negara-kota diarahkan padanya sebagai kebaikan tertinggi di komunitas politis itu.

Bila kita berangkat dari pembukaan *Politics* tentang adanya kebaikan atau tujuan dari komunitas politis sendiri, maka apakah isi dari Kebaikan Umum? Aristoteles tidak memberikan isinya. Kiranya bagi Aristoteles hidup manusia itu begitu kompleks dan bervariasi secara inheren sehingga dalam pandangannya akan politik ia tidak memberikan formulasi yang berlaku universal hasil penalaran deduktif dari kodrat manusia secara ilmiah. Penalaran dalam politiknya adalah penalaran praktis dari kearifan orang-orang biasa dari pengalaman keseharian mereka.⁹ Ini tidak mengherankan bila diikuti pengertian bahwa bagi Aristoteles ilmu praktis seperti etika dan politik bukan ilmu pasti seperti matematika (NE 1094b14). Rupanya Aristoteles menyerahkan pada para calon legislator yang dididiknya untuk dengan penalaran praktisnya sendiri menentukan apa yang tepat sebagai isi dari Kebaikan Umum. Ketika seorang calon legislator memiliki pengertian etis memadai dan karenanya menjadi baik secara etis, maka ia dapat mengarahkan dan mendidik para warga negara untuk menjadi baik secara etis, yang mana hidup yang baik secara etis dari para warga negara ini berperan bagi perwujudan Kebaikan Umum. Tampaknya bagi Aristoteles perwujudan Kebaikan Umum menuntut pemikiran mengenai isi dan bagaimana mengusahakannya dengan mempertimbangkan situasi khas negara. Pemikiran ini juga mencakup bagaimana kerja sama sosial para warga negara dalam rangka mencapai Kebaikan Umum ini. Di samping itu, tidak mudahnya mengidentifikasi isi Kebaikan Umum ini serupa dengan tidak mudahnya mengidentifikasi isi dari kebaikan terakhir individu sebagaimana tampak pada perbedaan klaim tentangnya.

Bila diakui bahwa adanya negara-kota adalah karena individu-individu terdorong mengaktualisasikan potensinya akan hidup yang baik, maka yang menjadi kebaikan negara-kota adalah tidak terpisah dari apa yang membuat individu-individu berasosiasi dalam negara-kota, yaitu mengaktualisasikan potensinya akan hidup yang baik itu. Bukankah bagi Aristoteles dalam pembukaan "*Politics*"-nya negara-kota itu suatu "ke-partner-an" yang tercipta karena mereka membentuknya sama-sama mengejar suatu tujuan atau kebaikan yang merupakan tujuan atau kebaikan paling otoritatif dari semua? Tidakkah pada pembukaan *Politics* tatkala Aristoteles mendefinisikan apa itu *polis* beserta kebaikan *polis* itu tampak adanya apa yang dianggap sebagai kebaikan yang sama oleh individu-individu yang "ber-partner" itu? Tidakkah itu berarti bahwa yang menjadi Kebaikan Umum, sebagai kebaikan negara-kota itu, tidak lain daripada kebaikan individu-individu yang berpartner itu? Lagipula, tentang apa yang menjadi kebaikan individu yang juga merupakan kebaikan komunitas, termasuk yang politis, ditemukan juga dalam *Nicomachean Ethics*: "Tujuan dari

⁹ CARNES LORD, "Aristotle" dalam LEO STRAUSS & JOSEPH CROPSEY (eds.), *History of Political Philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago dan London, 1987, 120.

politik adalah yang terbaik dari tujuan; dan perhatian utama dari politik adalah menghasilkan suatu karakter tertentu dalam pada warga negara dan membuat mereka baik dan siap menampilkan tindakan-tindakan yang luhur." (1099b30) Karakter yang baik ini pertama-tama merupakan perhatian utama individu-individu. Ia menyusun kebaikan tertinggi pribadi. Karena itu, kalau isi kebaikan pada Kebaikan Umum pada dasarnya tidak berbeda dengan kebaikan pada kebaikan pribadi, maka isi Kebaikan Umum adalah pembentukan karakter yang baik (keutamaan) yang menyusun hidup dengan baik. Suatu masyarakat ada demi mengusahakan hidup yang baik bagi anggota-anggotanya.¹⁰ Kepenuhan manusia terletak pada hidup dengan baik (NE I, 4, 1095a18-20) dan hidup dengan baik terwujud dengan aktivitas-aktivitas berkeutamaan (NE I, 1097b22-98a18). Sebagaimana kebaikan pribadi yang dibahas dalam *Nicomachean Ethics* dicapai dengan tindakan-tindakan berkeutamaan, demikian pula dengan Kebaikan Umum atau Kebaikan *Polis*. Bedanya di sini hanya bahwa kebaikan pada negara-kota lebih besar, lebih lengkap, dan lebih luhur daripada individu.¹¹ Di buku 7 dari "*Politics*" Aristoteles mengulangi argumennya bahwa kepenuhan atau kebahagiaan diidentifikasi dengan hidup keutamaan atau lebih tepat "keutamaan dan kearifan dan tindakan yang sesuai dengannya." Lagipula, di tempat yang sama Aristoteles menunjukkan bahwa apa yang benar bagi individu haruslah benar bagi polis secara keseluruhan. "Bahkan jika tujuan adalah sama bagi seorang individu dan bagi suatu negara-kota, tujuan milik negara-kota tampak bagaimanapun juga lebih besar dan lebih komplis untuk dicapai dan dipelihara. Karena meskipun pantas mencapai itu bagi hanya seorang individu, adalah lebih luhur dan lebih ilahi untuk melakukannya bagi suatu bangsa atau negara kota." (NE I.2.1094b7-10).

Aristoteles menyebut bahwa mengusahakan hidup berkeutamaan sebagai apa yang perlu bagi para warga-negara kota untuk mencapai kepełuhannya merupakan perhatian negara-kota: "Keutamaan harus merupakan suatu perhatian pada setiap kota, atau sekurang-kurangnya setiap orang padanya istilah dikenakan benar-benar dan tidak semata-mata dalam cara berbicara" (*Pol* III, 9.1280a24-81a) Perhatian pada keutamaan, yang merupakan karakter yang baik secara moral atau keunggulan etis, bagi para warganya dilakukan negara-kota dalam rangka mewujudkan Kebaikan Umum-nya, yaitu hidup dengan baik dari para warganya. Ini berimplikasi bahwa hidup dengan baik sebagai isi Kebaikan Umum menjadi tujuan tertinggi semua tindakan dengan kebaikannya sendiri dalam negara-kota. Pemerintah pun dalam mengambil tindakan dan membuat hukum melayani Kebaikan Umum itu. Kebaikan Umum ini yang menjadi pengatur dan pengukur tindakan-tindakan dalam lingkup negara-kota.

Apakah Kebaikan Umum ini diarahkan pada warga negara saja atau juga mencakup yang bukan warga negara? Pada Aristoteles Kebaikan Umum yang diusahakan negara-kota di sini adalah kebaikan umum untuk para warga negara saja. Yang bukan warga negara seperti para budak dan warga negara asing tidak menjadi subjek Kebaikan Umum. Di samping itu, tidak semua penduduk asli suatu wilayah dilihat sebagai warga negara.

¹⁰ MORRISON, *Op. cit.*, 167.

¹¹ LORD, *Op. cit.*, 122.

Kriteria warga negara menurut Aristoteles tidak jelas, namun ada yang bisa dianggap sebagai faktor distinguishingnya, yaitu "berbagi dalam tugas" (*Pol.*, III 1, 1275a22-33). "Berbagi dalam tugas" di sini menunjuk pada keterlibatan dalam hidup negara-kota dengan mengaplikasikan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih untuk posisi dalam pemerintahan dan hak untuk menjadi juri dalam pengadilan. Para warga negara adalah mereka yang memiliki hak-hak politik yang penuh dalam negara (*Pol.*, III.1.1275b17-20). Mereka adalah "yang ambil bagian dalam tugas pertimbangan pengambilan keputusan dan hukum." (*Pol.*, III, 1-2).

Jadi, Kebaikan Umum negara-kota adalah hidup dengan baik para warganya.

2. Bagaimanakah Negara-Kota Mengusahakan Kebaikan Umum?

Dikatakan dalam *Politics* III 6-7 bahwa Kebaikan Umum dicapai melalui suatu kerja sama sosial di antara warga negara-kota. Dalam Buku III, misalnya, ditemukan pernyataan Aristoteles sebagai berikut:

"Pertama-tama, kemudian, kita harus meletakkan untuk tujuan apa negara-kota dikonstitusikan, dan berapa banyak jenis pemerintahan yang berkenaan dengan manusia dan hidup komunal. Dalam diskusi-diskusi kita yang pertama, sesungguhnya, di mana kesimpulan-kesimpulan dicapai tentang penataan rumah tangga dan pemerintahan oleh seorang tuan, dikatakan juga bahwa seorang manusia karena kodratnya merupakan binatang sosial. Itulah sebabnya, bahkan ketika mereka tidak memerlukan bantuan satu sama lain, orang tidaklah kurang menginginkan untuk hidup bersama, meskipun adalah juga benar bahwa manfaat bersama (*to koinēi sumpheron*) membawa mereka bersama, pada tingkat di mana ia menyumbang bagi suatu bagian dari hidup yang baik (*zen kalos*) pada tiap-tiap orang. Karena itu, ini pertama-tama merupakan tujuan (*telos*) dari setiap orang, apakah bersama-sama (*koinēi*) atau secara terpisah." (III 6, 1278b15-24).

Tampak di sini bahwa Kebaikan Umum diusahakan dalam negara-kota dengan kerja sama para warga negara-kota dalam negara-kota sebagai komunitas yang paling berdaya karena otoritas yang dimilikinya untuk merealisasikannya. Adalah para negarawan yang melalui konstitusi dan aplikasinya mengatur bagaimana kerja sama tersebut seharusnya dilakukan. Aristoteles menyusun teori politiknya bagi para negarawan dalam mengusahakan Kebaikan Umum. Teori politik Aristoteles berpusat pada Kebaikan Umum. Menurut Morrison politik bagi Aristoteles menunjuk pada keterampilan, teknik, ilmu pengetahuan, kemampuan untuk mengusahakan Kebaikan Umum bagi segenap warga negara-kota.¹² Politik termasuk pada ilmu praktis yang berobjekkan tindakan-tindakan yang baik yang mengantarkan sampai pada kebaikan tertinggi atau kepenuhan. Politik berkenaan dengan bagaimana membuat *polis* mencapai kebaikan tertingginya atau kepenuhannya atau Kebaikan Umum. Sebagaimana

¹² MORRISON, *Op. cit.*, 167.

kebaikan tertinggi pribadi dicapai dengan tindakan-tindakan yang berkeutamaan, demikian juga dengan Kebaikan Umum, yang dicapai dengan tindakan-tindakan berkeutamaan para warga polis. Politik berkenaan dengan bagaimana mengusahakan supaya melalui tindakan-tindakan berkeutamaan para warga polis, Kebaikan Umum dapat tercapai.

Sebagaimana kepenuhan manusia terletak pada hidup dengan baik yang terwujud dengan aktivitas-aktivitas berkeutamaan, Kebaikan Umum pun terletak pada aktivitas-aktivitas berkeutamaan para warga negara, yang untuk mengarahkan dan menggerakkannya diperlukan legislasi yang disusun para negarawan.¹³ Legislasi ini termasuk pada konstitusi. Konstitusi merupakan "struktur-kekuasaan yang mewujudkan dan meningkatkan tujuan-tujuan sosial dan nilai-nilai moral negara." Ia mengungkapkan tugas-tugas negara beserta bagaimana tugas-tugas itu didistribusikan, unsur mana yang paling menentukan kuasanya beserta karakter pemerintahannya, tujuan dari negara. (1289a15-18)¹⁴ Tugas terpenting negarawan adalah memberikan konstitusi yang terutama berkenaan dengan memberlakukan hukum, kebiasaan, dan institusi, termasuk sistem pendidikan moral, bagi para warga negara.¹⁵ Sehubungan dengan ini, Kebaikan Umum dipakai Aristoteles untuk membedakan pemerintahan yang baik dari yang buruk. Diakui bahwa bentuk pemerintahan dapat memiliki tujuan Kebaikan Umum maupun kepentingan penguasa sendiri. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang fokus mengusahakan Kebaikan Umum semua warga negara. Bentuk pemerintahan apa yang tepat untuk ini? Aristoteles tidak memberikan jawaban. Yang terpenting baginya, apapun bentuk pemerintahannya, penguasa terarah dan bekerja untuk mengusahakan Kebaikan Umum. Lagipula, Aristoteles meletakkan pemerintahan berdasarkan hukum sebagai yang esensial bagi pemerintahan (1291b39-1292a38). Karena itu, peran legislasi adalah sangat penting dan menentukan.

Diakui oleh Aristoteles adalah tidak mungkin mencapai kepenuhan tanpa hal-hal lahiriah seperti kekayaan, sahabat-sahabat, kekuasaan politis, anak-anak, kelahiran yang baik, penampilan baik (bdk. NE I, 8.1099b3-6). Akan tetapi, hanya syarat-syarat material itu tidak bisa dicapai kebahagiaan bila tanpa keutamaan. Sebagaimana dari pandangan-pandangan umum Aristoteles mengajukan pandangan tentang letak kepenuhan manusia untuk kemudian direfleksikan lagi menurut fungsi khas manusia, yaitu fungsi rasional, demikian pula kiranya isi dari Kebaikan Umum tidak terpisah dari fungsi khas manusia para warga negara.

Dalam Buku VIII *Politics* Aristoteles menulis: "Bahwa, karena itu, legislator harus membuat pendidikan kaum muda sebagai objeknya yang di atas segalanya tidak akan disanggah oleh siapa pun." (1337a10). Selanjutnya, dikatakannya: "Karena hanya ada satu tujuan tunggal bagi polis sebagai suatu keseluruhan, jelaslah bahwa pendidikan haruslah tidak dapat tidak satu dan sama untuk semua,....." (1337a21). Pendidikan berperan

¹³ Negarawan menurut Aristoteles adalah yang mengkombinasikan keutamaan moral dengan inteligensi praktis, pengalaman, dan pengetahuan akan karakteristik-karakteristik partikular dari kota atau orang-orang (LORD, *Op. cit.*, 131)

¹⁴ TREVOR J. SAUNDERS, "The Politics", dalam *ROUTLEDGE HISTORY OF PHILOSOPHY, Vol. II (FROM ARISTOTLE TO AUGUSTINE)*, Routledge, London, 1999, 130.

¹⁵ <http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/> (17 Sept. 2016, 09. 01)

signifikan bagi perwujudan Kebaikan Umum yang terletak pada hidup yang baik dari para warganya. Bila hidup yang baik itu merupakan hidup yang berkeutamaan, maka negara, dalam hal ini pemerintah, seharusnya mendukung perkembangan keutamaan para warga negara. Karena itu, adalah tugas pemerintah untuk mengembangkan keutamaan para warga negara dalam rangka mencapai Kebaikan Umum, yang mana ini diaplikasikan melalui pendidikan. Agar bisa mengusahakan pendidikan keutamaan bagi para warga negara, negarawan selaku pemegang kuasa pemerintahan harus mengetahui dan bahkan menghidupi keutamaan-keutamaan itu. Dengan kata lain, pemegang kuasa politis seharusnya memiliki hidup yang baik agar dapat mempromosikan hidup yang baik bagi para warga negara melalui legislasi yang dibuatnya. Itulah sebabnya, Aristoteles melakukan pendidikan para calon negarawan mengenai hidup berkeutamaan sebagaimana ini tampak pada *Nicomachean Ethics*.¹⁶ Untuk bisa mengusahakan Kebaikan Umum, yaitu mewujudkan hidup yang baik para warga negara melalui legislasi, para legislator dididik dulu mengenai bagaimana mencapai hidup yang baik melalui hidup berkeutamaan itu. Di samping itu, pendidikan dalam keutamaan bagi para calon pemimpin negara secara khusus diarahkan pada pembentukan keutamaan kearifan, yang pertama-tama diperlukan supaya jiwanya tidak diganggu oleh emosi-emosi yang merusak. Di sini tampak hubungan antara etika, sebagai diskursus tentang mencapai kepenuhan manusiawi, dan politik, sebagai diskursus tentang bagaimana politikus mencapai Kebaikan Umum: Ketika seorang calon legislator memiliki pengertian etis memadai dan karenanya menjadi baik secara etis, maka ia dapat mengarahkan dan mendidik para warga negara untuk menjadi baik secara etis, yang mana hidup yang baik secara etis dari para warga negara ini berperan bagi perwujudan Kebaikan Umum. Dengan pengertiannya tentang hidup yang baik dan penghayatannya diharapkan legislator dapat mengetahui dan menentukan apakah isi dari Kebaikan Umum sesuai dengan keadaan *polis* dan memutuskan kebijakan politis untuk merealisasikannya. Selanjutnya, sehubungan dengan pendidikan warga negara dalam kaitannya dengan Kebaikan Umum adalah penting pula menekankan perkembangan keutamaan intelektual dan moral sekaligus. Keutamaan intelektual berkembang dengan pengajaran dan perkataan, sedangkan keutamaan moral tumbuh dengan pembiasaan. Sehubungan dengan ini pengembangan keutamaan ini pendidikan untuk menumbuhkan keutamaan kearifan para warga negara merupakan sesuatu yang sangat penting karena kearifan berperan menentukan secara tepat pilihan tindakan yang diambil secara deliberatif dalam tiap situasi hidup beserta sarana untuk merealisasikannya.

Meskipun demikian, keberadaan negara-kota demi tujuan mengusahakan hidup yang baik bagi para warganya ini tidak lantas membuat setiap individu warga negara berhak

¹⁶ Akan tetapi, karena polis didukung orang-orang yang berbeda-beda secara kualitatif menurut pekerjaan-pekerjaannya, maka keutamaan dari semua warga negara adalah tidak sama. Warga negara yang menjadi penguasa seharusnya memiliki kearifan (*prudence*) sebagai "satu-satunya keutamaan yang khas bagi penguasa." Ini menunjukkan adanya kelas yang "memerintah" dalam arti lebih kuat daripada warganegara biasa dan karenanya menuntut suatu pendidikan dalam kearifan lebih daripada pengalaman hidup polis yang biasa. (LORD, *Op. cit.*, 139.)

menuntut negara membuat mereka mengalami hidup yang baik maupun membuat tersedia apa-apa yang perlu untuk itu secara setara bagi setiap orang. Manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari negara-kota merupakan hasil dari kerja sama sosial yang menuntut partisipasi para warga negara-kota sehingga akses pada manfaat-manfaat itu tidak terpisah dari seberapa besar partisipasi yang diberikan para warga negara dalam kerja sama sosial itu.

Meskipun demikian, keberadaan negara-kota demi tujuan mengusahakan hidup yang baik bagi para warganya ini tidak lantas membuat setiap individu warga negara berhak menuntut negara membuat mereka mengalami hidup yang baik maupun membuat tersedia apa-apa yang perlu untuk itu secara setara bagi setiap orang. Manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari negara-kota merupakan hasil dari kerja sama sosial yang menuntut partisipasi para warga negara-kota sehingga akses pada manfaat-manfaat itu tidak terpisah dari seberapa besar partisipasi yang diberikan para warga negara dalam kerja sama sosial itu.

Jadi, Kebaikan Umum diusahakan perwujudannya melalui kerjasama para warga negara, yang mana kerja sama ini diatur oleh pemegang kuasa politis (pemerintah). Kerja sama yang dimaksud di sini adalah hidup berkeutamaan, sedangkan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk itu dilakukan dengan konstitusi atau legislasi. Di samping itu, diperlukan pendidikan bagi para warga negara. Karena itu, para negarawan harus dididik khususnya tentang hidup yang baik, dan politik sebagai keterampilan mengusahakan Kebaikan Umum agar dapat menjalankan tugasnya mengusahakan Kebaikan Umum melalui legislasi dan pendidikan para warga negara, khususnya kaum muda, untuk hidup yang baik.

Tanggapan

Pada ide Kebaikan Umum pada Aristoteles terlihat kebaikan komunitas yang tak terpisah dari kebaikan individual, yang mana kebaikan itu sama-sama berkenaan dengan karakter etis atau hidup berkeutamaan para warga negara. Hidup dengan baik secara etis menyusun kebaikan tertinggi negara.

Akan tetapi, kalau Kebaikan Umum negara itu terletak pada hidup yang baik dari para warganya, dan hidup yang baik itu diupayakan dengan keutamaan, apakah mungkin negara modern melakukan formasi karakter baik atau keutamaan para warganya sedemikian rupa sebagai kebaikan tertingginya? Negara mana yang menjadikan hidup yang baik dalam hidup berkeutamaan para warganya sebagai Kebaikan Umumnya? Seandainya suatu negara menjadikan hidup baik itu Kebaikan Umumnya, tidakkah muncul banyak hal yang menunjukkan kesulitan serius bahkan ketidakmungkinan: Bila jumlah warga negara itu begitu banyak, bagaimana Kebaikan Umum yang seperti itu dapat diusahakan? Apa dasar dan isi dari karakter yang baik itu dan siapa yang menentukannya di hadapan pluralitas dan kebebasan? Keutamaan yang mana yang diperhatikan? Apakah semua keutamaan seperti yang digambarkan Aristoteles dalam Buku II-V *Nicomachean Ethics*? Lantas, bagaimana melakukan perwujudan Kebaikan Umum itu? Apakah tiap orang bisa memiliki keutamaan-

keutamaan karena keutamaan menuntut kemampuan untuk mengaplikasikan fungsi rasio manusia secara tepat dan bahkan secara habitual, yang memunculkan soal apakah setiap warga suatu negara memiliki kemampuan itu, apalagi mengingat bahwa tidak sama kemampuan orang untuk mengupayakan keutamaan? Lagipula, tidakkah dapat diduga bahwa lebih dominan pandangan bahwa pembentukan karakter itu diserahkan pada individu dan keluarga serta lembaga-lembaga, tetapi bukan negara? Tidakkah campur tangan negara terhadap pendidikan karakter individu bisa jadi dianggap justru sebagai melewati batas wewenang negara? Sekiranya pun negara melakukannya, tidakkah yang dilakukannya itu dipandang lebih tepat sebagai anjuran dari tugas sampingan suatu negara dalam kerangka membantu para warga negara melengkapi apa yang warga negara tidak mampu melakukannya, sementara pada Aristoteles pendidikan karakter itu menyusun kebbaikannya sebagai negara yang tidak mungkin bisa terwujud kalau itu dijadikan sekadar anjuran? Apakah ide tentang Kebaikan Umum pada hidup baik para warga negara melalui hidup berkeutamaan memiliki pendukungnya pada masa kini? Siapa orang yang melihat pembentukan keutamaan, yang merupakan keunggulan etis, para warga negara sebagai tujuan utama, kalau bukan pertama, dari negara?

Bila Kebaikan Umum tidak bisa tidak menuntut partisipasi anggota-anggota komunitas untuk bekerja sama merealisasikannya, bagaimana kerja sama sosial itu dilakukan dalam negara dengan penduduk yang begitu banyak? Tidakkah gagasan politik Aristoteles, yang berkenaan dengan bagaimana membawa para warga negara pada Kebaikan Umum, terarah pada warga negara-kota Athena yang jumlahnya tidak lebih dari 15 persen dari populasi, yaitu para laki-laki dewasa yang bukan budak dan yang salah satu orang tuanya adalah warga negara Athena?¹⁷ Bagaimana bisa diterima apalagi dalam negara modern bahwa yang bukan warga negara tidak memiliki akses pada Kebaikan Umum baik sebagai hasil maupun proses mewujudkannya.

Sehubungan dengan Ajaran Sosial Gereja Katolik seperti yang disinggung di awal: Meski sama-sama meletakkan Kebaikan Umum sebagai kebaikan-nya sendiri negara, bukan kebaikan individu-individu atau pun kumpulan kebaikan individu, namun tidakkah pengertian Kebaikan Umum dalam Ajaran Sosial Gereja berbeda dengan yang menurut Aristoteles dalam hal apakah Kebaikan Umum itu sesuatu yang instrumental. Pada Ajaran Sosial Gereja Kebaikan Umum dilihat sebagai sesuatu yang instrumental berupa syarat-syarat yang harus diupayakan ketersediaannya oleh negara agar individu-individu dapat merealisasikan kebaikan-kebaikan pribadi mereka.¹⁸ Sementara itu, pada Aristoteles Kebaikan Umum bukan sesuatu yang instrumental, tapi benar-benar menjadi tujuan yang berdiri sendiri yang disasar atau kepadanya para warga negara ambil bagian, dan lagipula isinya adalah hidup baik para warga negara. Ini berbeda dengan Kebaikan Umum dalam Ajaran Sosial Gereja

¹⁷ <http://www.iep.utm.edu/aris-pol/> (16 Sept. 2016, 13. 37)

¹⁸ *Mater et Magistra*, #65: "Jumlah keseluruhan dari syarat-syarat dari hidup sosial, di mana pribadi-pribadi dimampukan secara lebih penuh dan lebih siap untuk mencapai kesempurnaan mereka.": *Pacem in Terris*, #55: "Jumlah total dari syarat-syarat sosial yang membuat orang, baik sebagai kelompok-kelompok maupun sebagai individu-individu, mencapai kepenuhan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah."

yang karena instrumental, maka ia bisa terletak pada misalnya keamanan, jalan, listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, pendidikan, dll.

Bagaimanapun juga teori etis maupun politis Aristoteles memantulkan apa yang dianggap paling mengagumkan atau paling baik atau paling bernilai bagi Aristoteles maupun masyarakat zamannya. Setiap zaman dan setiap masyarakat memiliki apa yang baginya merupakan paling mengagumkan atau paling dipandang tinggi, yang dari sana bisa mengalir teori etis maupun politis mereka.

Di hadapan pertanyaan: Apa sumbangan ide Kebaikan Umum Aristoteles bagi persoalan yang dihadapi negara kita masa kini, dapat diajukan pertanyaan relevan seperti: Apakah pembentukan keutamaan para warga negara juga dianggap sebagai tujuan negara kita atau Kebaikan Umum Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah karakter etis para warga negara itu sesuatu yang paling mengagumkan atau paling bernilai yang dilihat masyarakat politis Indonesia?

Bibliografi (yang dikutip):

ARISTOTELES, *Nicomachean Ethics*

ARISTOTELES, *Politics*

DESLAURIERS, MARGUERITE dan DESTREE, PIERRE, *The Cambridge Companion to Aristotle's Politics*, Cambridge University Press, NY, 2013.

ROUTLEDGE HISTORY OF PHILOSOPHY, Vol. II (FROM ARISTOTLE TO AUGUSTINE),
Routledge, London, 1999.

STRAUSS, LEO & CROPSEY, JOSEPH (eds.), *History of Political Philosophy*, The University of Chicago Presss, Chicago dan London, 1987.